

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tengah**

###### **a. Sejarah**

Kabupaten Daerah Maluku Tengah sebagai salah satu kabupaten di Maluku yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 (L.N. No. 49/1952) tentang pembubaran daerah Maluku selatan dan pembentukan Maluku Tengah dan Maluku Tenggara. Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tanggal 18 Januari 1957, tentang pokok-pokok pemerintah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, maka dibentuk daerah-daerah "*Swatantra*" diantaranya daerah Swatantra Provinsi Maluku dengan undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 (L.N. No. 79/1957) yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 20 Tahun 1958 (L.N. No. 60/1958).

Selanjutnya sesuai pasal 73 ayat 4 undang-undang darurat No. 22 Tahun 1957 maka dibentuk pula daerah-daerah Swatantra Kabupaten, sehingga dibentuklah daerah Swatantra Kabupaten di Maluku dengan undang-undang darurat No. 23 tahun 1957 (L.N. No. 80/1957), yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang No. 60 Tahun 1958 (L.N. No 111/1958) yang meliputi daerah-daerah Swatantra Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Utara, Maluku Tenggara dan Kota Ambon.

Wilayah-Wilayah yang termasuk dalam daerah Swatantra Kabupaten Maluku Tengah adalah : Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease, Pulau-Pulau Banda, Seram Timur, Seram Utara, Seram, Selatan, Seram Barat, dan Pulau Buru sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 35 Tahun 1952 tersebut.

Kabupaten Maluku Tengah beribukota di Masohi ini memiliki luas wilayah secara keseluruhan 11.595,57 km<sup>2</sup> terbagi menjadi 11 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Seram di sebelah utara, Laut Banda di sebelah selatan, Kabupaten Buru di sebelah barat, serta Provinsi Papua di sebelah timur. Aktivitas perdagangan lebih mendominasi kegiatan perekonomian dan hanya bisa diungguli oleh aktivitas pertanian dalam arti luas: pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Di Maluku Tengah terdapat 10 pasar dengan pusat kegiatan tersier ini berada di Pasar Binaya di Kecamatan Kota Masohi, pasar ini melayani perdagangan besar dan eceran meliputi kebutuhan pokok hingga elektronika dengan distribusi barang-barang ke berbagai pulau di Kabupaten yang 92,4 persen wilayahnya berupa laut.

Komoditas unggulan perkebunan daerah ini berupa cengkeh juga dikirim ke luar kabupaten untuk memasok kebutuhan industri rokok. Daerah penghasil cengkeh seperti Kecamatan Amahe, Kairatu, Seram Barat, Bula, Taniwel, Seram Utara, Werinama, Leihtu, Salahutu, pulau Haruku, Saparua, Nusa Laut, dan Tehoru. Komoditas unggulan perkebunan lainnya berupa pala dan fuli ini ditanam di Kecamatan Seram Timur, Leihtu, dan Saparua. Kelancaran

angkutan disertai peningkatan keamanan telah mendorong ekspor komoditas hasil alam dapat semakin lancar dikirimkan ke berbagai negara tujuan.

Produk ekspor terbesar Kabupaten yang bermotto Pamahanu Nusa yang berarti membangun nusa dan bangsa adalah akyu lapis hasil olahan dari hutan di Pulau Seram, selain itu juga terdapat kayu gergajian, kayu bulat, dan arang kayu diekspor ke Jepang, Belanda, Belgia, Aljazair, dan negara-negara di Timur Tengah. Hasil alam lain yang laku di luar negeri adalah ikan tuna dan udang dalam keadaan beku, kabupaten bergaris pantai 2.230 Km ini memang memiliki potensi besar dalam usaha perikanan.

Daerah ini juga memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan yang dapat memberikan pemasukan bagi kas daerah ini, obyek wisata yang beragam mulai dari pantai, goa, danau, air panas, taman laut, wisata budaya, hingga wisata ssejarah dikunjungi. Di sektor pertambangan, daerah ini juga memiliki potensi tambang berupa emas, mika hitam, gas bumi, batu bara, dan piryt akan membantu meningkatkan perekonomian daerah menyusul eksploitasi minyak bumi di Kecamatan Bula oleh perusahaan asing asal Australia bekerja sama dengan Pertamina dengan produksi 515 barrel per hari.

#### **b. Nilai Budaya**

Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat

menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Pendukung kebudayaan di Maluku terdiri dari ratusan sub suku, yang dapat diindikasikan dari pengguna bahasa lokal yang diketahui masih aktif dipergunakan sebanyak 117 dari jumlah bahasa lokal yang pernah ada kurang lebih 130-an. Meskipun masyarakat di daerah ini mencerminkan karakteristik masyarakat yang multi kultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan-kesamaan nilai budaya sebagai representasi kolektif. Salah satu diantaranya adalah filosofi Siwalima yang selama ini telah melembaga sebagai *world view* atau cara pandang masyarakat tentang kehidupan bersama dalam kepelbagaian. Di dalam filosofi ini, terkandung berbagai pranata yang memiliki *common values* dan dapat ditemukan di seluruh wilayah Maluku. Sebutlah pranata budaya seperti masohi, maren, sweri, sasi, hawear, pela gandong, dan lain sebagainya. Adapun filosofi Siwalima dimaksud telah menjadi simbol identitas daerah, karena selama ini sudah dipaterikan sebagai dan menjadi logo dari Pemerintah Daerah Maluku.

Dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai budaya lokal yang masih ada dan hidup di kalangan masyarakat, dapat dipandang sebagai modal sosial yang perlu dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah.

## **2. Gambaran Umum Kecamatan Banda Neira**

Kepulauan Banda Neira merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Secara geografis terletak

diantara 5'43 – 6'31 Lintang Selatan dan 129'44 – 130'04 Bujur Timur yang berbatasan dengan Selat Seram dibagian Utara, Kepulauan Teon Nila Serua dibagian Selatan, Laut Banda dibagian Timur, dan Laut Banda dibagian Barat. Wilayah Kecamatan Banda sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan dan berbukit akan tetapi persebaran desa di wilayah kecamatan Banda terdapat pada pesisir pantai.

Kepulauan Banda Naira memiliki 11 pulau yang terdiri dari 7 pulau berpenghuni yaitu Pulau Neira, Pulau Banda Besar, Pulau Ay, Pulau Rhun, Pulau Hatta, Pulau Sjahrir (Pulau Pisang), dan Pulau Gunung Api dan 4 pulau tidak berpenghuni yaitu Pulau Nailaka, Pulau Manukang, Pulau Batu Kapal, dan Pulau Karaka. Banda Neira merupakan kecamatan yang terdiri dari 18 negeri/desa antara lain di Pulau Neira terdapat 6 desa (Nursantara, Dwiwarna, Merdeka, Kampung Baru, Tanah Rata, dan Rajawali); Pulau Banda Besar terdapat 9 desa (Lonthoir, Waling Spanciby, Selamon, Boiyauw, Combir, Waer, Uring Tutra, Lautang, Dender); Pulau Ay terdapat 1 desa (Ay); Pulau Rhun terdapat 1 desa (Rhun); dan Pulau Hatta terdapat 1 desa (Hatta).

### **3. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a) Tugas Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang :

- Pekerjaan Umum ;
- Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

**Sekretariat** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kesekretariatan. Rincian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- pelaksanaan koordinasi perencanaan program, anggaran dan laporan dinas.
- pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- pengelolaan administrasi kepegawaian.
- pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan.
- pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor.
- pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota.
- penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kota.
- pemberian izin usaha pariwisata skala kota.
- Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.

- penetapan rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota.
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota.

**Bidang Kebudayaan** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang kebudayaan. Rincian tugas Bidang Kebudayaan sebagai berikut:

- penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal ;
- penetapan rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan ;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota ;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa ;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota ;

- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota ;
- pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota ;
- pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan ;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman ;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman ;
- pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota ;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota ;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
- penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota;



- penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota ;
- pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota ;
- penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota ;
- penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota ;
- pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota ;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional ;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota ;
- pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota ;
- pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah ;
- pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah ;

- pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah ;
- penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota ;
- pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota (dimasyarakat, muatan budaya);
- pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah ;
- pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota ;
- pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota.;
- penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota ;
- penerapan pedoman penelitian arkeologi ;
- penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota ;
- penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota ;
- penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi ;
  1. penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa ;
  2. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat ;

3. pengembangan jaringan informasi kebudayaan ;
  4. peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat ;
  5. pemberian advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi:
    1. pelaksanaan dan hasil kegiatan.
    2. pengendalian dan pengawasan kegiatan.
  - pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat ;
  - pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota ;
  - pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota ;
  - pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota ;
  - pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota ;
  - penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota;
  - penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota;
  - pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota ;
  - penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota ;

- pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota ;
- pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota ;
- pelaksanaan fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota ;
- penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota ;
- pemberian fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota ;
- penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota;
- pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota ;
- pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota;
- pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota ;
- pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota
- pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota ;
- pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota
- pemetaan sejarah skala kota ;
- pelaksanaan koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota;
- penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota ;
- pelaksanaan registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota;
- pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota;

- penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kota;
- pelaksanaan koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota;
- pemberian izin survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
- pengembangan dan pemanfaatan museum kota;
- pelaksanaan registrasi museum dan koleksi di kota ;
- penyelenggaraan akreditasi museum di kota;
- penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota;
- pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota;
- pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

**Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang jasa dan sarana pariwisata. Rincian tugas Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata sebagai berikut:

- pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota;
- pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota.

- pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring evaluasi sarana penunjang pariwisata (jasa pameran, konvensi, insentif dan meeting) skala kota.

**Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang rekreasi dan hiburan umum. Rincian tugas Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum sebagai berikut:

- pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
- pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota;
- penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota;
- penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.

**Bidang Obyek dan Promosi Wisata** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang obyek dan promosi wisata. Rincian tugas Bidang Obyek dan Promosi Wisata sebagai berikut:

- pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota ;
- pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata ;

- pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota;
- penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota;
- pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota;
- pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota;
- penyelenggaraan promosi skala kota;
- peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;
- pengadaan sarana pemasaran skala kota;
- pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota;
- penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota;
- pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi;
- pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota;

**b) Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum ;

- pembinaan dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ;
- pengelolaan ketatausahaan Dinas ; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian ;
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian ;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian ;
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian ;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Keuangan** mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan



- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan ;
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan ;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Seni Budaya** mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang seni budaya ;
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang seni budaya ;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang seni budaya ;
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang seni budaya ;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Sejarah, Museum dan Cagar Budaya** mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sejarah, museum dan cagar budaya ;
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sejarah, museum dan cagar budaya ;

- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sejarah, museum dan cagar budaya ;
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang sejarah, museum dan cagar budaya ;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Jasa Kepariwisata**an mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa kepariwisataan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang jasa kepariwisataan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang jasa kepariwisataan ;
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang jasa kepariwisataan ;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Sarana Kepariwisata**an mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana kepariwisataan;

- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sarana kepariwisataan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang sarana kepariwisataan ;
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang sarana kepariwisataan ;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jasa dan Sarana Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Rekreasi** mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekreasi ;
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang rekreasi ;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang rekreasi;
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang rekreasi ;
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Hiburan Umum** mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hiburan umum

- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang hiburan umum
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang hiburan umum
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang hiburan umum
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kepariwisata** mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Promosi Wisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Promosi Kepariwisata** mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi kepariwisataan
- menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi kepariwisataan
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang promosi kepariwisataan
- menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang promosi kepariwisataan
- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Obyek dan Promosi Wisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c) Visi Dan Misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah**

**1. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah**

Mewujudkan kepariwisataan Maluku yang berkelanjutan dan berorientasi global dan local, berbasis ekowisata, sejarah dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

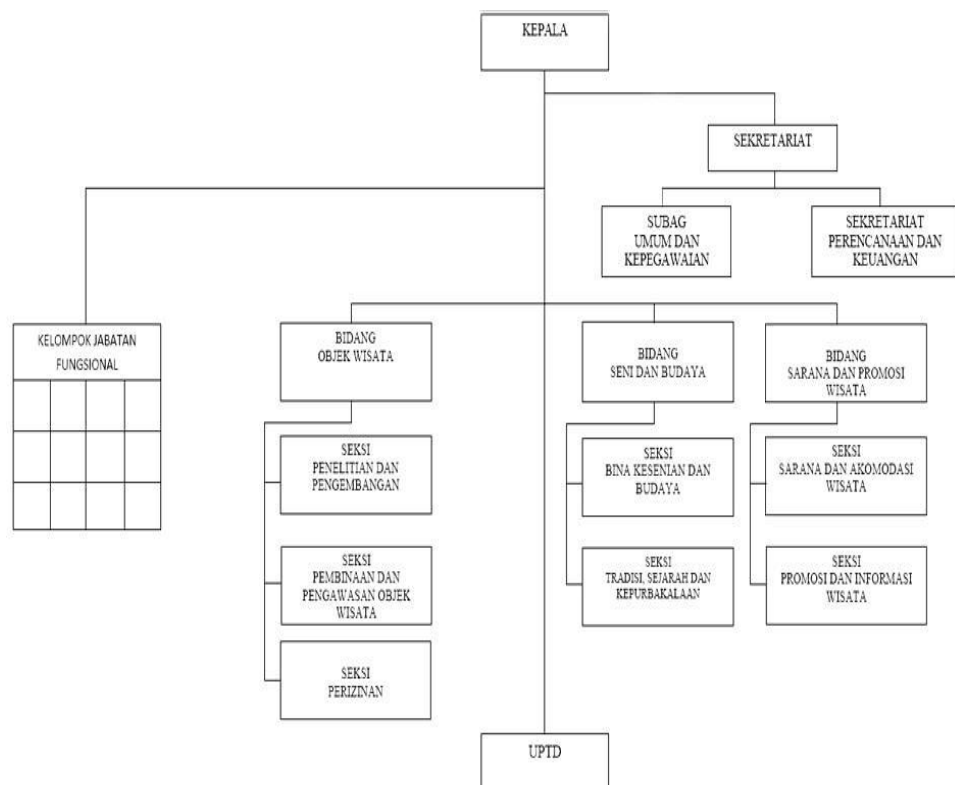
**2. Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah**

Untuk mewujudkan visi dinas kebudayaan dan pariwisata, misi yang dilaksanakan adalah:

- Memanfaatkan secara lestari potensi wisata alam, budaya dan sejarah dengan melibatkan peran aktif masyarakat
- Meningkatkan sarana dan prasarana

- Mengembangkan kawasan potensial pariwisata, khusus untuk pengembangan wisata bahari
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat
- Melaksanakan usaha ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya local
- Mempromosikan potensi pariwisata dan menjalani kemitraan usaha antar wilayah
- Menjadikan pariwisata sebagai wahana pemberdayaan masyarakat serta pemerataan kesempatan berusahatan kerja

d) Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah



#### **4. Profil Dinas UPTD Kebudayaan dan pariwisata Kecamatan Banda Naira**

Dinas UPTD Kebudayaan dan pariwisata Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah didirikan pada tanggal 10 november 2010 yang bertepatan dengan diadakannya kegiatan SAIL BANDA pada tahun 2010.

##### **1. Tugas Dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira**

Dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah mempunyai tugas yaitu memberikan informasi wisata, seni dan budaya Kecamatan Banda Naira, mempromosikan wisata, seni dan budaya dan melaksanakan event-event guna menarik wisatawan baik domestic maupun manca Negara.

##### **2. Fungsi Dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira**

- Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- Pembinaan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Pembinaan unit pelaksana teknis dinas
- Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
- Pelaksanan tugas lain di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai kebijakan yang di tetapkan oleh bupati.

##### **3. Visi dan Misi Dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira Tengah Kabupaten Maluku Tengah**

a) Visi Dinas Kebudayaan dan Karpariwisata Kabupaten Maluku Tengah

Mewujudkan kepariwisataan Maluku yang berkelanjutan dan berorientasi global dan local, berbasis ekowisata, sejarah dan budaya untuk kesejahteraan masyarakat.

b) Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah

Untuk mewujudkan visi dinas kebudayaan dan pariwisata, misi yang dilaksanakan adalah:

- Memanfaatkan secara lestari potensi wisata alam, budaya dan sejarah dengan melibatkan peran aktif masyarakat
- Mengembangkan budaya local sesuai dengan tata nilai
- Meningkatkan sarana dan prasarana
- Mengembangkan kawasan potensial pariwisata, khusus untuk pengembangan wisata bahari
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat
- Melaksanakan usaha ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya local
- Mempromosikan potensi pariwisata dan menjalani kemitraan usaha antar wilayah
- Menjadikan pariwisata sebagai wahana pemberdayaan masyarakat serta pemerataan kesempatan berusaha kerja

4. Rekapitulasi jumlah wisatawan asing dan lokal/nusantara ke Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah

Perkembangan kunjungan wisatawan memberikan kontribusi besar dalam. Berikut disajikan jumlah wisatawan



mancanegara yang berkunjung ke Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah dalam tiga tahun terakhir perkembangan pariwisata.

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Banda Naira Tahun 2014 – 2016

Kawasan	Tahun kunjungan		
	2013	2014	2015
Asia	30	27	320
Australia	167	125	110
Amerika	67	154	126
Eropa	397	528	1228
Afrika	-	1	3
Jumlah total	661	889	1.787

Sumber : - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku  
- Kepolisian Resort Pulau-Pulau Banda Naira

Tabel 3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal/Nusantara ke Kepulauan Banda Naira Tahun 2014 – 2016

Kota	Tahun kunjungan		
	2013	2014	2015
Jakarta	135	143	62
Surabaya	-	22	46
Makassar	30	7	21
Bali	15	-	-
Ternate	-	6	14
Maluku	367	469	213
Jumlah total	547	641	356

Sumber : - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata UPTD Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku  
- Kepolisian Resort Pulau-Pulau Banda Naira

## **B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemasaran Pariwisata Bahari Di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah**

### **1. Pemerintah sebagai Regulator**

Maluku dijadikan sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) dengan citra wisata bahari (*marine tourism*), mengingat Maluku adalah Provinsi kepulauan memiliki kekayaan alam pantai yang indah beserta kekayaan atraksi wisata lautnya serta ditunjang oleh alam pegunungan dan objek bersejarah. Kebijakan pembangunan pariwisata Provinsi Maluku didasarkan pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang sejalan dengan arah pembangunan kepariwisataan di tingkat nasional, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia, budaya dan lingkungan.

Sebagai Regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada para pelaku wisata baik pihak swasta, wisatawan maupun masyarakat sebagai persyaratan agar kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Berikut penjelasan Kabid sarana dan promosi wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah:

”Secara Nasional kebijakan politik tentang pembangunan daerah telah diberikan pedoman sesuai Intruksi Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2005 , tentang kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Didalam kebijakan setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyusun RIPPDA ( Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Provinsi Maluku telah memiliki RIPPDA yang disusun pada Tahun 2005. Tetapi Kabupaten Maluku Tengah dimana Kecamatan Banda Naira berada belum memiliki RIPPDA. Oleh karenanya acuan yang digunakan untuk mengembangkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira menggunakan pedoman yang tertera dalam RIPPDA tersebut. Namun sekarang Dinas Kabupaten Maluku Tengah

Berkomitmen terus menggenjot potesni Pariwisata Malteng sesuai dengan Visi Misi Bupati Malteng, Tuasikal Abua. Komitmen tersebut ditunjukkan Dispar Malteng dengan ingin melegalkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini masih menjadi dokumen studi yang tidak memiliki kekuatan dalam mendongkrak pariwisata Malteng. Untuk menghasilkan Produk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RIPPARDA yang sesuai dengan perkembangan pariwisata saat ini, maka Dispar Malteng menggandeng Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk menyusun naskah akademik.” (Hasil wawancara SR, 5 Maret 2016).

Sebagaimana dari hasil wawancara diatas dengan penjelasan Kabid sarana dan promosi wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah dapat dianalisis jika peran pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maluku Tengah dalam pengelolaan serta pemasaran pariwisata di Kecamatan Banda Naira perpedoman pada RIPPDA provinsi, karena Kabupaten Maluku Tengah belum memiliki RIPPDA, namun pemerintah dalam upaya menggenjot dunia kepariwisataan di daerah Maluku Tengah sedang menyusun rancangan RIPDA dengan bekerjasama dengan pihak UGM untuk membuat naskahnya.

Dalam RIPPDA Provinsi Maluku, dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap potensi ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) aksesibilitas dan potensi ekonomi kemudian dikelompokkan menjadi 5 buah KKP (Kawasan Pengembangan Pariwisata). Kecamatan Banda Naira terletak dalam KKP 1 (Kawasan Pulau-Pulau) Ambon, Pulau Haruku, Saparua Nusa Laut dan Kepulauan Banda Naira.

Berikut hasil wawancara dengan kepala UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira:

“Peran pemerintah sebagai regulator berpedoman pada RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, UU NO 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda. Dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata. Dengan berpedoman pada peraturan di atas kami dapat mengontrol kepariwisataan yang ada di Kecamatan Banda Naira seperti izin usaha pariwisata, dimana setiap masyarakat yang ingin berusaha dibidang pariwisata harus melapor dan mendapat izin dari kami dengan demikian maka pendapatan daerah dari segi pariwisata dapat dikontrol dengan baik”. (Hasil wawancara DD, 7 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa peran pemerintah sebagai regulator berpedoman pada RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, peraturan UU NO 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. , Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda, Dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata. Sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mengelola kepariwisataan yang ada di Kecamatan Banda Naira dan pendapatan daerah dari segi pariwisata dapat tercover dengan baik.

Pendapat yang sama diutarakan oleh informan RS selaku Sekretaris Camat Banda Naira

"RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, Undang-Undang No 10 Tahun 2009, , Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda, Dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata. adalah merupakan dasar hukum yang digunakan pemerintah setempat untuk mengatur dan mengontrol kepariwisataan di Kecamatan Banda Naira, jadi setiap pengelola hotel atau penginapan setiap buiannya harus melapor jumlah wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal yang berkunjung ke Banda Naira dan menginap di tempat inereka dengan demikian

jumlah wisatawan yang datang ke Banda Naira setiap tahunnya dapat didata dengan baik." (Hasil wawancara RS, 8 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas jelas bahwa peran Pemerintah dalam mengelola dan memasarkan pariwisata di Kecamatan Banda Naira berpedoman pada RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, Undang-Undang NO 10 Tahun 2009, , Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda, dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata, dimana pemerintah dapat mengontrol setiap jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya melalui laporan kunjungan tamu dari pihak pengelola hotel atau penginapan.

Lanjut dari YL pemilik hotel Bintang Laut selaku pihak swasta mengatakan bahwa:

"Cara kami mendatangkan wisatawan atau touris yaitu dengan mempromosikan pariwisata Banda Naira di social media dan website kami kemudian kami tawarkan paket wisata didalamnya, kadang ada wisatawan yang datang dengan menggunakan pesawat atau kapal Pelni ada juga yang datang dengan kapal pesiarnya langsung. Namun setiap wisatawan yang kami datangkan dan menginap di hotel kami, kami selalu melapor ke Pemerintah berapa jumlah wisatawan yang datang, berapa lama mereka di Banda Naira dan kegiatan apa saja yang mereka lakukan selama berada di Banda Naira dan itu selalu kami laporkan setiap bulannya.."(Hasil wawancara YL, 15 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik hotel sekaligus pihak swasta di atas bahwa cara mereka mendatangkan wisatawan adalah dengan mempromosikan pariwisata Banda Naira ke social media dan website pribadi kemudian mereka tawarkan paket wisata dan mengantarkan wisata wan-wisata wan tersebut ke lokasi wisata yang

ingin mereka datang dengan didampingi *guide* mereka dan setiap wisatawan yang mereka datangkan dan menginap ditempat mereka, mereka langsung melapor ke pemerintah setempat berapa jumlah wisatawan yang datang, kegiatan apa saja yang mereka lakukan dan berapa lama mereka di Banda Naira.

Namun pendapat yang berbeda diutarakan oleh anggota Komunitas Pemuda Cinta Banda mengatakan bahwa:

"Masalah kepariwisataan di Kecamatan Banda Naira terutama Pariwisata Bahari hingga saat ini yang saya ketahui masih didominasi oleh pihak-pihak swasta dalam hal ini pihak pengelola perhotelan atau penginapan. Mungkin dibutuhkan peraturan daerah yang baru mengenai pengelolaan pariwisata agar pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira bisa dinikmati oleh semua pihak bukan cuman pihak swasta saja tetapi juga pihak masyarakat. "(Hasil wawancara RL. 15 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kepariwisataan di Kecamatan Banda Naira terutama Pariwisata Bahari dalam hal pengelolaan serta pemasarannya lebih didominasi oleh pihak swasta atau pengelola perhotelan/penginapan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Senada dengan pernyataan diatas JK tokoh masyarakat selaku kepala desa disalah satu desa yang berada di Kecamatan Banda Naira mengatakan bahwa:

"Memang Banda Naira memiliki banyak potensi pariwisata apalagi Pariwisata Baharinya yang menurut saya merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia karena keadaan lautnya yang masih alami, namun yang disayangkan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Banda-Naira hanya dinikmati oleh sebagian orang saja. Kami masyarakat biasa tidak pernah ambil bagian dalam kepariwisataan yang ada di Banda Naira. Saya berharap kedepannya ada program atau peraturan dan pemerintah setempat untuk mengelola dan mempromosikan Pariwisata yang ada dengan melibatkan seluruh

lapisan masyarakat bukan cuman pihak-pihak tertentu saja yang bisa menikmati potensi pariwisata yang ada".( Hasil wawancara JK, 18 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masyarakat setempat tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan serta pemasaran pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira

Senada dengan pendapat di atas berikut hasil wawancara dengan RA selaku kepala Desa dan merupakan salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Banda Naira:

“Pesona alam terutama keindahan laut Banda Naira menurut saya sudah sangat terkenal sampai ke luar Negeri buktinya dengan bertambahnya kunjungan wisatawan baik local maupun asing ke sini, namun lagi-lagi di butuhkan peran penting dari pemerintah setempat dalam mengontrol dan mengelola pariwisatanya agar bukan hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat menikmati pendapatan dari segi pariwisatanya, tetapi juga masyarakat local juga harus di manfaatkan agar dapat membantu pendapatan masyarakat” (Hasil wawancara RA, 18 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa perlu adanya peran pemerintah yang lebih agar masyarakat local juga dapat mendapatkan penghasilan dari segi pariwisata.

Berikut hasil wawancara dengan AP selaku wisatawan yang berkunjung ke Kecamatan Banda Naira:

“Kalau di tanya soal peraturan yang di terapkan di Kecamatan Banda Naira mengenai pariwisata saya cuman bisa memberi tanggapan saja, menurut saya memang perlu adanya peraturan pemerintah dalam mengontrol dan menjaga setiap wisatawan yang datang. Kecamatan Banda Naira kan terkenal dengan keindahan bawah lautnya, saya takutnya keindahan itu akan rusak dengan ulah para wisatawan yang dengan seenak-enaknya melakukan snorkling atau diving tanpa memperhatikan terumbu karangnya. Kayaknya dibutuhkan peraturan khusus untuk mengantisipasinya”. (Hasil wawancara AP, 19 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa pemerintah harus lebih aktif dalam mengontrol dan menjaga setiap wisatawan yang datang agar keindahan alam Kecamatan Banda Naira dapat terus terjaga dengan membuat suatu peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan diatas mengenai peran pemerintah sebagai Regulator penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dalam hal pemasaran dan pengelolaan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira pemerintah masih mengacu pada RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, Undang-Undang NO 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, , Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda, dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata. Hal ini sesuai dengan teori Iyas Yusuf (2014:05) mengenai peran pemerintah dalam hal ini peran pemerintah sebagai regulator dimana pemerintah sudah membuat suatu peraturan yang mengatur tentang kepariwisataan yang ada di Kecamatan Banda Naira namun realitanya sejauh ini, kebijakan pengembangan yang dirumuskan pemerintah daerah belum mampu memberikan kemajuan signifikan bagi perekonomian masyarakat lokal dikarenakan dalam pengelolaan destinasi wisata (penyediaan sarana-prasarana penunjang kegiatan wisata sebagian besar masih dikelola oleh pihak swasta). Keberadaan pihak swasta dalam pengelolaan destinasi wisata di Kepulauan Banda tercermin dari



banyaknya hotel dan *guest house* maupun infrastruktur penunjang (penyedia alat *diving* dan *snorkeling*) yang pemiliknya adalah para *entrepreneur* yang berasal dari luar daerah.

## **2. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator**

### **a. Sosialisasi**

Dalam teori manajemen dinamisator sebagai *actuating*. Penggerakan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar Bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Di dalam manajemen, penggerakan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Peran Pemerintah sebagai Dinamisator adalah adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan

pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Pengembangan sistem informasi kepariwisataan, penataan dan pembangunan prasarana /infrastruktur yang bersifat pelayanan umum. Dalam hal ini dimaksud pemerintah memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya memasarkan dan menjaga pariwisata di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah terutama pariwisata bahari agar pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah dapat di kenal oleh wisatawan baik local maupun mancanegara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala bidang Sarana dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah.

"Sosialisasi yang kami lakukan untuk memasarkan dan mempromosikan pariwisata bahari yang ada di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah yaitu dengan memanfaatkan social media yang kami miliki seperti facebook, twitter dan lain-lain, kami mempunyai website khusus yang menggambarkan secara jelas tentang potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah Maluku Tengah tidak terkecuali pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira karena Banda Naira merupakan salah satu ikon pariwisata yang ada di Maluku Tengah. Namun kendala utamanya adalah transportasi menuju ke Kecamatan Banda Naira karena daerah Maluku merupakan daerah kepulauan jadi kami dari pihak Kabupaten sangat sulit memantau secara langsung perkembangan pariwisata yang ada di sana. Namun kami selalu berkoordinasi dengan dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata di Banda Naira tentang apa saja kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan untuk memasarkan pariwisata bahari yang ada di sana". (Hasil wawaneara SR, 2 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawaneara dengan Kepala bidang Sarana dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku

Tengah dapat dianalisis bahwa pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan dalam mempromosikan pariwisata bahari yang ada di Kecamatan Banda Naira salah satunya dengan memanfaatkan media social sebagai sarana untuk mempromosikan wisata bahari yang ada seperti facebook, instagram, twitter, dan juga mempunyai website resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah agar masyarakat bisa mengetahui potensi-potensi pariwisata yang ada di daerah Maluku Tengah terutama Banda Naira.

Berikut hasil wawancara dengan kepala UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira

"Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memasarkan atau mempromosikan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira yaitu dengan mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Kecamatan Banda Naira melalui social media dengan cara pemerintah Kabupaten membuat website khusus tentang pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira agar wisatawan baik local maupun mancanegara dapat mengecek langsung tentang objek-objek wisata di Banda Naira melalui website tersebut. Namun kami dari pihak Kecamatan Banda Naira belum mempunyai website sendiri dan kami juga sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan Banda Naira dan Pihak-pihak swasta yang memiliki penginapan atau hotel tentang masalah kebersihan, yaitu jangan membuang sampah di laut karena dapat merusak terumbu karang. Kami juga memasang papan-papan himbauan di lokasi-lokasi objek wisata seperti situs sejarah, pantai dan lain-lain agar pengunjung atau wisatawan dapat menjaga kebersihan di lokasi tersebut. Karena dengan menjaga kebersihan di lokasi-lokasi wisata, terutama kebersihan laut merupakan modal utama untuk menarik wisatawan datang ke Banda Naira. Namun kegiatan sosialisasi ini belum teragendakan waktunya. (Hasil wawancara DD, 7 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira diatas, dapat

dianalisis bahwa pemerintah dalam upaya memasarkan pariwisata di Kecamatan Banda Naira telah melakukan berbagai macam bentuk sosialisasi, diantaranya pemerintah kabupaten membuat website khusus tentang pariwisata Banda Naira dan pemerintah kecamatan dalam hal ini dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat dan pihak swasta yang memiliki penginapan dan hotel agar menjaga kebersihan dengan cara jangan membuang sampah di laut karna dapat merusak terumbu karang dan ekosistem bawah laut dan juga berdampak negatif dari pariwisata terutama pariwisata bahari. Namun kegiatan penyuluhan tersebut belum teragendakan waktunya.

Pernyataan kepala UPTD Kebudayaan dan Pariwisata dibenarkan oleh salah satu tokoh masyarakat selaku kepala desa disalah satu desa yang berada di Kecamatan Banda Naira yang mengatakan:

"Mengenai kegiatan sosialisasi yang dikatakan oleh dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata memang betul adanya jika mereka datang melakukan sosialisasi, apalagi desa kami berada dipesisir pantai dan terdapat salah satu objek wisata pantai. Dalam penyuluhan tersebut mereka jnemberi penjelasan tentang pentingnya-menjaga kebersihan laut dan pantai di sekitar objek wisata yang berada di desa kami. Saya diberi mandat untuk mengajak masyarakat merawat dan menjaga kebersihan pantai dengan cara jangan membuang sampah di laut. Namun kayaknya kegiatan sosialisasi ini belum menjadi agenda bulanan atau tahunan oleh pemerintah setempat karena kadang mereka datang sosialisasi empat bulan sekali bahkan tahun kemarin tidak ada kegiatan sosialisasi tersebut di desa kami".(Hasil wawancara RA 11 Maret2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis jika kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata

Kecamatan Banda Naira benar adanya karena kepala desa selaku tokoh yang mewakili masyarakat diberikan mandat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira mengajak masyarakat mengikuti sosialisasi yang dilakukan tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai dan laut dengan tidak membuang sampah ke laut. Namun agenda sosialisasi tersebut belum teragendakan dengan baik oleh pemerintah melalui dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata

Berikut hasil wawancara dengan YL pemilik hotel Bintang Laut selaku pihak swasta mengatakan bahwa:

"Kami sering didatangi oleh pihak pemerintah melalui Dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira, mereka datang memberikan sosialisasi ke tempat kami tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kemudian hasil sosialisasi tersebut kami selalu sampaikan kepada para tamu atau para wisatawan yang menginap dihotel kami agar supaya menjaga kebersihan terutama di tempat-tempat wisata yang mereka kunjungi melalui *guide* atau pemandu wisata kami".(Hasil wawancara YL, 14 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pemerintah melalui Dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan sosialisasi kepihak swasta tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama kebersihan di lokasi-lokasi wisata kemudian pihak swasta menyampaikan kembali hasil sosialisasi tersebut kepada para tamu atau wisatawan yang menginap dihotel mereka melalui *guide* atau pemandu wisata.

Dari keseluruhan wawancara mengenai peran pemerintah sebagai Dinamisator penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan

perannya sebagai Dinamisator pemerintah memanfaatkan social media sebagai wadah untuk mempromosikan Pariwisata Bahari yang ada di Kecamatan Banda Naira dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pihak swasta mengenai pentingnya menjaga kebersihan, terutama kebersihan laut, namun penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah belum efektif karena kegiatan tersebut belum teragendakan dengan baik.

#### **b. Festival**

Festival, dari bahasa Latin berasal dari kata dasar "festa" atau pesta dalam bahasa Indonesia. Festival biasanya berarti "pesta besar" atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati sesuatu. Atau juga bisa diartikan dengan hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting atau bersejarah, atau pesta rakyat.

Dalam hal ini peran pemerintah sebagai dinamisator dalam upaya memasarkan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira yaitu dengan mengadakan festival sebagaimana yang dikatakan oleh kepala bidang Sarana dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah

"Salah satu kegiatan kami selaku pihak pemerintah Kabupaten dalam upaya memasarkan dan mempromosikan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira yaitu dengan mengadakan festival bahari, Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan sekitar 7 tahun terakhir dan mendapat respon positif dan masyarakat. Tujuan kami mengadakan festival ini agar dapat menarik wisatawan baik wisatawan local maupun mancanegara agar dapat berkunjung ke Banda Naira dan juga untuk menjaga nilai adat dan budaya masyarakat Banda Naira itu sendiri".( Hasil wawancara YL, 2 Maret 20 16)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam upaya mempromosikan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira pemerintah kabupaten maluku tengah mengadakan sebuah festival bahri yang merupakan agenda tahunan pemerintah dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegaa agar dapat berkunjung ke Kecamatan Banda Naira.

Senada dengan yang dikatakan kepala bidang Sarana dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah, kepala dinas UPTD Kecamatan Banda Naira mengatakan bahwa:

"la kalau soal diadakannya festival memang sudah menjadi agenda tahunan oleh pemerintah Kabupaten yaitu festival bahari dengan tujuan untuk mempromosikan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira dan juga untuk menarik wisatawan datang ke Kecamatan Banda Naira. Kegiatan ini mulai diadakan pada tahun 2009 dan waktu diadakannya itu satu kali dalam setahun yaitu setiap tanggal 10 bulan November dengan jenis kegiatannya yaitu lomba kora-kora (perahu dayung) yang diikuti oleh setiap desa yang ada di Kecamatan Banda Naira, namun kemarin kami dari UPTD Dinas Pariwisata Banda Naira mengusulkan kepada pemerintah Kabupaten agar kegiatan festival ini jangan cuman diisi dengan lomba perahu dayung saja namun diisi juga dengan kegiatan-kegiatan lain, alhamdulillah pada tahun 2015 kemarin selain perlombaan perahu dayung, kami juga mengisi festival ini dengan kegiatan lomba photography bawah laut, lomba mancing tradisional, dan kegiatan-kegiatan lainnya dan luar biasanya kegiatan festival pada tahun 2015 kemarin dibuka oleh kementrian pariwisata. Itu sangat berpengaruh positif bagi pariwisata di Kecamatan Banda Naira". (Hasil wawancara DD, 7 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD Kebudayaan dan Pariwisata diatas dapat dianalisis bahwa pemerintah melalui pemerintah Kabupaten sudah melakukan upaya dalam memasarkan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira dengan mengadakan suatu

festival yaitu festival Bahari yang mulai diadakan pada tahun 2009 sampai sekarang. Kegiatan ini diadakan sekali dalam setahun yaitu setiap tanggal 10 November dengan berbagai kegiatan seperti perlombaan kora-kora (perahu naga), lomba fotografi bawah laut, dan lomba mancing tradisional.

Lebih lanjut menurut Sekretaris Kecamatan Banda Naira mengatakan bahwa:

"Festival Bahari yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten memang sangat membantu dalam memasarkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira terbukti dengan banyaknya kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun saya berharap kegiatan seperti ini jangan cuman pemerintah Kabupaten, tetapi pemerintah Provinsi juga bisa mengadakan kegiatan serupa agar pariwisata di Kecamatan Banda Naira bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sebenarnya kami dari Kecamatan juga ingin mengadakan kegiatan seperti ini tapi lagi-lagi kami terkendala dana dan kamipun dalam melakukan suatu kegiatan harus melalui persetujuan dari Kabupaten". (Hasil wawancara RS, 8 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Camat diatas dapat dianalisis bahwa kegiatan Festival Bahari yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten memang sangat berdampak positif dalam upaya mempromosikan pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira, namun masih kurang dukungan dari pemerintah Provinsi.

Berikut pendapat dari YL pemilik hotel Bintang Laut selaku pihak swasta mengatakan

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan Festival Bahari yang diadakan oleh pemerintah karena dapat menarik kunjungan wisatawan, setiap bulan November jumlah tamu yang datang ke tempat kami melonjak sangat drastis, ini membuktikan bahwa kegiatan Festival tersebut mampu memperkenalkan pariwisata



khususnya pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira ke masyarakat luas bahkan banyak juga wisatawan asing yang datang ke Banda Naira hanya untuk menikmati kegiatan tersebut. Namun sayangnya kegiatan positif seperti ini diselenggarakan hanya sekali dalam setahun, saya berharap kedepannya kegiatan seperti ini dapat diadakan empat atau lima kali dalam setahun agar pariwisata khususnya pariwisata bahari yang ada di Kecamatan Banda Naira lebih dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara". (Hasil wawancara YL, 15 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kegiatan Festival bahari yang diadakan oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Kecamatan Banda Naira namun waktu pelaksanaan kegiatan tersebut kurang efektif karena hanya diadakan sekali dalam setahun. Senada dengan pernyataan diatas, JK tokoh masyarakat selaku kepala desa disalah satu desa yang berada di Kecamatan Banda Naira mengatakan bahwa:

"Saya selaku masyarakat Banda Naira sangat mendukung dengan diadakannya kegiatan Festival bahari tersebut karena itu merupakan kegiatan yang sangat meriah dan melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat. Apalagi dengan berbagai lomba yang diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Banda Naira. Dan dengan diadakannya kegiatan seperti ini, bukan hanya pariwisata bahari tetapi juga budaya dan adat istiadat kami bisa diperkenalkan kepada masyarakat luar. Saya berharap kedepannya kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dan menjadi agenda Nasional, bukan hanya tingkat Kabupaten tetapi juga tingkat pusat harus mendukung kegiatan seperti ini. Jangan cuman sekali dalam setahun tetapi seseringkali mungkin bisa diadakan." ( Hasil wawancara JK, 18Maret2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kegiatan Festival Bahari yang diadakan oleh pemerintah mendapat dukungan penuh oleh masyarakat Banda Naira karena kegiatannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, namun kegiatan ini diharapkan

jangan cuman diadakan sekali lialam setahun tapi diadakan seserihg mungkin.

Berdasarkan keseluruhan wawancara mengenai peran pemerintah sebagai Dinamisator penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai Dinamisator dalam upaya memasarkan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira pemerintah mengadakan beberapa kegiatan diantaranya sosialisasi berupa penyuluhan tentang menjaga dan memelihara objek-objek pariwisata dan kegiatan Festival Bahari yang sudah menjadi agenda tahunan oleh pemerintah. Hasilnya cukup efektif dalam mempromosikan pariwisata bahari yang ada di Kecamatan Banda Naira. Hal ini sesuai dengan teori Iyas Yusuf (2014:05) tentang peran pemerintah dalam hal ini sebagai dinamisator dimana pemerintah telah melakukan kegiatan-kegiatan dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk kepentingan pemasaran pariwisata di kecamatan Banda Naira. namun waktu dan pelaksanaannya yang dinilai terlalu lama karena hanya sekali dalam setahun.

### **3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator**

Dalam ranah publik sering kita kenal istilah pemerintah sebagai fasilitator, acap kali juga kita dengar istilah pemerintah sebagai pelayan public. Secara bahasa fasilitator bermakna pemberi atau penyedia fasilitas dan pelayan publik bisa dipahami sebagai pemberi layanan kepada publik atau masyarakat. Dari segi pariwisata Fasilitator adalah Penataan dan penyediaan fasilitas penunjang, pemasyarakatan dan pembudayaan sapta

pesona pengembangan promosi pariwisata. (Citra Destinasi). Berikut hasil wawancara dengan kepala seksi Sarana dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah

"Bentuk fasilitas yang kami berikan dalam memasarkan pariwisata bahari di daerah Maluku Tengah khususnya Kecamatan Banda Naira berupa suinbangan dana ke pihak kecamatan untuk merawat destinasi-destinasi wisata yang ada di Banda Naira dan juga kami bekerjasama dengan pihak televisi swasta agar menayangkan setiap destinasi wisata yang ada di daerah Maluku Tengah dengan tujuan supaya masyarakat lebih mengenal potensi wisata yang ada di daerahnya sendiri". (Hasil wawancara SR, 3 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu memberikan sumbangan dana kepada pihak kecamatan untuk merawat destinasi wisata yang ada di Kecamatan Banda Naira dan juga mempromosikan pariwisata dengan bekerjasama dengan pihak televisi swasta agar masyarakat lebih mengenal potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Maluku Tengah terutama Kecamatan Banda Naira.

Berikut hasil wawancara dengan kepala dinas UPTD kebudayaan dan pariwisata Kecamatan Banda Naira:

"Berbicara fasilitas ada fasilitas yang bersifat fisik dan non fisik, sejauh ini belum ada fasilitas yang bersifat fisik yang diberikan oleh UPTD pariwisata Kecamatan Banda Naira dalam hal memasarkan pariwisata Bahari. Fasilitas nonfisik yang diberikan dinas UPTD pariwisata yaitu dengan memasarkan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira ke social media, kami membuatkan website khusus yang menggambarkan segala bentuk potensi pariwisata khususnya pariwisata bahari yang ada di Kecamatan Banda Naira dan akun facebook nya dinas UPTD pariwisata dengan tujuan agar pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira cepat dikenal oleh masyarakat luas dan juga agar mempermudah para wisatawan yang ingin berkunjung ke

Kecamatan Banda Naira karna dapat di akses dan diliat melalui internet". (Hasil wawancara AJ, 7Maret2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam peran dinas UPTD pariwisata sebagai rasilitator dalam hal ini berbicara mengenai fasilitas, ada dua jenis fasilitas yaitu fasilitas fisik dan nonfisik.

Dinas UPTD pariwisata hanya memberikan fasilitas nonfisik seperti mebuat website khusus tentang pariwisata bahari dan akun facebook. Dimana dalam website dan facebook tersebut menggambarkan segala bentuk potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira serta akses hubungan menuju ke Kecamatan Banda Naira dan hotel atau penginapan yang bisa ditempati oleh wisatawan.

Senada dengan pendapat di atas, dari pihak kecamatan terkait fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, sekretaris camat Kecamatan Banda Naira mengatakan bahwa:

"Memang kalau dilihat dari segi fasilitas fisik, peran pemerintah sebagai fasilitas dalam upaya memasarkan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira belum ada. Pihak swasta yang lebih berperan dalam hal ini. Lagi-lagi kami dari pihak pemerintah masih terkendala dana karena belum ada wewenang khusus untuk mengatur pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira kami mesih tergantung pada tingkat Kabupaten". (Hasil wawancara KS, 8 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa peran pemerintah sebagai fasilitator dilihat dari segi fasilitas fisik memang tidak ada. Pemerintah belum memberikan fasilitas seperti sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung dan memajukan pariwisata bahari di

Kecamatan Banda Naira dikarenakan terkendala anggaran dan yang lebih berperan dalam hal ini adalah pihak swasta.

Lanjut dari YL pemilik hotel Bintang Laut selaku pihak swasta mengatakan bahwa:

"Setau saya selama ini memang belum ada fasilitas fisik seperti sarana dan prasarana penunjang yang diberikan oleh pihak pemerintah. Yang berperan dalam hal itu adalah pihak-pihak swasta yang memang berbisnis di dunia pariwisata seperti pemilik-pemilik hotel dan penginapan yang ada di Kecamatan Banda Naira. seperti di hotel kami ini, kami menyediakan fasilitas penunjang seperti perahu yang diunakan untuk mengantar wisatawan baik local maupun mancanegara agar dapat berkeliling menikmati keindahan pulau Banda Naira dan menyediakan alat-alat snorkeling yang dapat disewakan oleh para wisatawan jika ingin diving. Tujuannya agar para wisatawan yang datang menikmati dan tertarik datang kembali ke tempat kami. Dan ini dana pribadi kami sendiri tanpa ada bantuan dana dari pemerintah setempat". (Hasil wawancara YL, 15 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa bahwa pihak swasta yang lebih berperan dalam memfasilitasi sarana prasarana penunjang pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira. mereka menyediakan perahu dan alat-alat diving kepada para wisatawan dengan tujuan agar para wisatawan dapat merasa puas dan menikmati segala fasilitas yang ditawarkan oleh mereka dan ini merupakan hal positif untuk memajukan pariwisata bahari yang ada di Kecamatan Banda Naira.

Berikut hasil wawancara dengan RL selaku pengurus Komunitas Pemuda Cinta Banda mengatakan bahwa:

"Yang saya lihat selama ini peran pemerintah dari segi fasilitator yaitu hanya sebatas fasilitas non fisik seperti membuat website resmi Pemkab, namun untuk fasilitas fisik seperti sarana penunjang belum ada, biasanya pihak swasta yang lebih berperan, tidak ada

kerja sama antara keduanya”. (Hasil Wawancara RL, 15 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa belum adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pihak swasta di dalam pengelolaan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira, pihak swasta yang lebih berperan dalam segi fasilitator fisik.

Senada dengan pendapat di atas, berikut hasil wawancara dengan JK selaku tokoh masyarakat:

“Kecamatan Banda Naira dianugerahi pesona alam yang luar biasa indahny, namun tidak terkelola dengan baik, kurangnya infrastruktur penunjang sehingga minat wisatawan yang datang juga akan berpengaruh, diharapkan pemerintah lebih berperan dalam hal ini agar dunia kepariwisataan yang ada di Kecamatan Banda Naira bisa lebih menarik lagi” (Hasil wawancara JK, 20 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa dibutuhkan peran pemerintah daerah dalam hal ini perannya sebagai fasilitator agar kepariwisataan di Kecamatan Banda Naira dapat dikenal lebih luas. Senada dengan pendapat di atas berikut hasil wawancara dengan RA selaku tokoh masyarakat:

“Banda Naira masih kurang infrastuktur penunjang seperti akomodasi penginapan, fasilitas penunjang wisata, dan lain-lain. Diharapkan peran pemerintah sebagai fasilitator harus bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut agar dapat menarik lebih minat pengunjung ke Banda Naira”. (Hasil wawancara RA, 25 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa masih kurangnya peran pemerintah sebagai fasilitator, dalam hal ini dalam pembangunan di zona-zona yang masuk destinasi wisata Bahari.

Berikut hasil wawancara dengan AP selaku wisatawan lokal asal

Bandung mengatakan bahwa:

"Saya mengetahui tentang keindahan pariwisata bahari di Banda Naira melalui internet dan akun sosial media salah satu masyarakat Banda Naira. Disitu saya langsung tertarik datang ke Banda Naira. Kalau berbicara soal fasilitas pariwisatanya saya rasa masih banyak yang perlu di benahi. Karna masih banyak fasilitas-fasilitas umum di lokasi Pariwisata yang belum ada, seperti toilet tempat sampah dan lain-lain. Saya berharap kedepannya pemerintah bisa memperhatikan hal tersebut karena sangat disayangkan kalau Banda Naira yang kaya akan wisata alamnya namun tidak didukung dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya". ( Hasil wawancara AP, 10 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masih kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang yang disediakan oleh pemerintah setempat dalam mendukung kepariwisataan di Kecamatan Banda Naira, misalnya fasilitas-fasilitas umum dilokasi wisata seperti toilet umum atau tempat-tempat sampah.

Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator hanya berperan dalam bentuk fasilitas nonfisik sedangkan fasilitas fisik seperti sarana prasarana penunjang pihak swasta yang lebih berperan. Sesuai dengan teori Iyas Yusuf (2014:05) dalam hal ini peran sebagai Fasilitator, pemerintah sudah memberikan perannya meskipun hanya berupa fasilitas non fisik dan Sayit Abdul Karim (2010:02) mengenai strategi pemasaran.

### **C. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Pemasarkan Pariwisata Bahari Di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah**

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang memudahkan proses peran Pemerintah dalam memasarkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah. Sedangkan faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah dalam memasarkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah.

#### **1. Faktor pendukung**

Faktor pendukung adalah faktor yang mendukung pemerintah dalam pemasaran Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira yaitu RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, , Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda, dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata. yang mengatur tentang kepariwisataan yang ada di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala bidang Sarana dan Promosi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah.

"la bisa dikatakan salah satu faktor pendukung pemerintah dalam memasarkan pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira yaitu RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasi, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda, dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata, karena dengan adanya aturan-aturan tersebut pemerintah dapat mengontrol, mengelola serta memasarkan pariwisata



khususnya Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira”. (Hasil wawancara SR, 3 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa faktor pendukung pemerintah dalam memasarkan pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira yaitu RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005, Undang-Undang Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, , Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda dan Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata, karena dengan Undang-Undang serta peraturan di atas pemerintah Daerah bisa mengontrol dan mengelola pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan kepala dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira:

“Selain peraturan yang di buat, faktor lain yang menjadi faktor pendukungnya adalah pesona alam yang ada di Kecamatan Banda Naira yang begitu indah baik laut maupun daratannya. Images kawasan Banda Naira yang sudah terkenal sejak zaman VOC, keamanan pengunjung, serta perkembangan teknologi dan informasi sangat membantu pemerintah dalam memasarkan serta mempromosikan setiap destinasi pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira” (Hasil wawancara DD, 6 Maret 2016)

Berdasarkan faktor pendukung adalah keindahan alam Kecamatan Banda Naira yang masih asri, image kawasan Banda Naira yang sudah terkenal sejak zaman VOC, serta perkembangan teknologi dan komunikasi. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris camat Kecamatan Banda Naira mengatakan bahwa:

“Laut Banda Naira di kenal sebagai salah satu laut di Indonesia yang memiliki flora yang beraneka ragam, baik ikan maupun terumbu karangnya, makanya pada tahun 2014 kemarin dikeluarkan Keputusan

Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 tentang Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda merupakan salah satu Kawasan Konservasi Perairan Nasional. Dengan tujuan agar keindahan laut serta kehidupan ekologi di dalamnya sepenuhnya dilindungi oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Di harapkan dengan adanya WTP laut Banda ini masyarakat Indonesia lebih mengenal Banda Naira lebih jauh sehingga minat pengunjung ke Banda Naira bisa bertambah.” (Hasil wawancara dengan RS, 8 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa salah satu faktor pendukung pemerintah yaitu karena laut Banda Naira memang sangat menarik sehingga banyak di kenal masyarakat luas. Selanjutnya hasil wawancara dengan YL selaku salah satu pengelola hotel di Kecamatan Banda Naira:

“Kecamatan Banda Naira merupakan daerah kepulauan yang jarak dengan ibu kota Provinsi dan Kabupaten sangat-sangat jauh namun dengan lancarnya jaringan baik jaringan operator maupun jaringan internet sangat bermanfaat sekali untuk mempromosikan keindahan alam yang ada di sini. Kami pihak sering meposting lokasi-lokasi terbaik di sini ke media social kami sehingga banyak masyarakat luar yang melihat dan tertarik datang ke Banda Naira. Menurut saya peran social media sangat membantu dalam mempromosikan keindahan alam Banda Naira.” (Hasil wawancara YL, 8 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa teknologi dan informatika dalam hal ini media social merupakan salah faktor penting dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira.

Berikut hasil wawancara dengan RL selaku pengurus Komunitas Pemuda Cinta Banda :

“Kalau menurut saya faktor pendukungnya ya karena Banda Naira sudah terkenal dari dulu, tentang sejarahnya zaman dulu tentang kekayaan rempah-rempahnya serta pesona alamnya, ini menjadi salah satu faktor pendukung dalam menarik minat wisatawan, tinggal bagaimana pemerintah setenpat serta masyarakat dalam menjaga image itu agar wisatawan mau datang ke Kecamatan Banda Naira.” (Hasil wawancara RL, 9 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa salah satu faktor pendukung pemerintah yaitu karena Kecamatan Banda Naira sudah terkenal sejak dulu tentang sejarah, kekayaan rempah-rempah dan pesona alamnya, sekarang tinggal tugas pemerintah serta masyarakat Kecamatan Banda Naira itu sendiri untuk menjaga serta melestarikan kekayaan yang sudah ada. Selanjutnya hasil wawancara dengan RA selaku tokoh masyarakat:

“Laut Banda Naira sangat terkenal dengan pesona bawah lautnya, banyak spot-spot yang bisa di datangi bagi para pecinta snorkeling maupun diving, banyak pulau-pulau yang indah, pantai, dan lain-lain. Itu merupakan faktor pendukung pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira. Tinggal bagaimana kita menjaganya.” (Hasil wawancara RA, 9 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa laut Banda Naira menyimpan sejuta keindahan dengan keragaman fauna di dalamnya, serta menyediakan banyak spot-spot atau lokasi buat *diving* dan *snorkeling*. Senada dengan pendapat di atas, berikut hasil wawancara dengan JK selaku tokoh masyarakat:

“Alam Banda Naira sudah menyediakan segalanya, tinggal bagaimana peran pemerintah dan pelaku-pelaku pariwisata dalam mempromosikannya saja agar banyak wisatawan yang tertarik dan mau datang ke Banda Naira.” (Hasil wawancara JK, 9 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa alam Kecamatan Banda Naira sudah menyediakan segalanya, sekarang tinggal tugas pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata dalam mempromosikannya ke masyarakat luas agar dapat menarik perhatian wisatawan. Berikut hasil wawancara dengan AP selaku wisatawan:

“Menurut saya Banda Naira merupakan surganya bagi para pelancong, disini semuanya ada, mau wisata sejarah, bahari, agrowisata, maupun budaya. Alamnya yang begitu indah dan alami membuat saya sangat

tertarik datang ke sini. Dan menurut saya peran social media sangat membantu. Saya tau tentang Banda Naira dari internet dan melalui sosial media. Bagi yang suka snorkeling dan diving kayaknya Banda Naira merupakan salah satu tempat destinasi terbaik yang dimiliki Indonesia ditambah penduduknya yang ramah dan keamanan selama berada disini yang terjaga membuat saya betah berada di sini.” ( Hasil wawancara AP, 9 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa Kecamatan Banda Naira bukan hanya memiliki wisata bahari saja, namun juga memiliki wisata sejarah, agrowisata, dan budaya. Dan masyarakat yang ramah serta keamanan yang terjaga. Serta peran social media yang sangat besar sehingga masyarakat luas bisa dapat dengan mudah mengetahui potensi pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira.

Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara diatas dapat dianalisis bahwa faktor pendukung upaya pemerintah dalam memasarkan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira yaitu dengan adanya RIPPDA Provinsi Maluku Tahun 2005. peraturan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang kepariwisataan, , Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 58 Tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zona Taman Wisata Perairan Laut Banda, Perda No 01 Tahun 2009 tentang retribusi izin pondok wisata, potensi alam yang dimiliki, adanya social media serta image Kecamatan Banda Naira yang terkenal sejak zaman VOC sehingga menjadi modal utama pemerintah dalam mengelola serta mengontrol pariwisata khususnya Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini sesuai dengan teori Iyas Yusuf (2014:05) tentang peran pemerintah dan terori yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller (2012 :.27), tentang bauran pemasaran.

## 2. Faktor penghambat

Kebijakan Pemerintah dalam pemasaran Pariwisata Bahari di Kecamatan tentunya mengalami suatu kendala atau hambatan. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari masyarakat, pengelola maupun pemerintah itu sendiri. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain kesulitan transportasi menuju ke kepulauan Banda Naira, masih minimnya akomodasi hotel/penginapan, sumber daya manusia yang kurang dimaksimalkan, serta kurangnya media pemasaran.

Berbagai kendala masih cukup banyak dihadapi masyarakat setempat pada tingkat internal masyarakat sendiri dan aspek eksternal yang juga turut mempengaruhi pengembangan wisata bahari di daerah ini. Berikut dibawah ini hasil wawancara dengan Kabid sarana dan promosi wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maluku Tengah

“Kendala utamanya yaitu soal moda transportasi, mengingat Kabupaten Maluku tengah merupakan Kabupaten kepulauan makanya perlu adanya moda transportasi laut yang memadai”( hasil wawancara SR, 6 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala utama yaitu moda transportasi yang masih minim sehingga menyulitkan para wisatawan untuk datang ke Kecamatan Banda Naira. Berikut hasil wawancara dengan kepala dinas UPTD Kebudayaan dan Pariwisata Kecamatan Banda Naira:

"Dalam upaya memasarkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira tidaklah mudah dikarenakan Banda Naira merupakan daerah kepulauan yang jauh dan ibu kota provinsi dan juga Kabupaten, kendala utamanya yaitu minim sekali media pemasaran serta masih kurangnya akses transportasi baik transportasi, laut maupun udara menuju ke Kepulauan Banda Naira, ini masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kami selaku pihak pemerintah kecamatan".( Hasil wawancara DD, 7 Maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa minimnya media pemasaran serta kurangnya akses transportasi baik transportasi laut maupun udara menjadi salah satu faktor penghambat pemerintah dalam memasarkan Pariwisata Bahari di Kecamatan Banda Naira Kabupaten Maluku Tengah. Senada dengan pendapat di atas, berikut hasil wawancara dengan sekretaris kecamatan Banda Naira:

“Kecamatan Banda Naira merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Maluku Tengah yang jaraknya sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten dan Provinsi, jadi dibutuhkan akses transportasi yang banyak untuk menuju ke Kecamatan Banda Naira. Sekarang ini jadwal kedatangan kapal laut cuman dua kali dalam seminggu. Itu yang membuat banyak wisatawan berpikir dua kali untuk datang ke Kecamatan Banda Naira karena minimnya akses transportasi.” (hasil wawancara RS, 8 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa minimnya moda transportasi yang hanya dua kali dalam seminggu membuat banyak wisatawan ragu untuk datang ke Kecamatan Banda Naira. Berikut hasil wawancara dengan YL selaku pengelola hotel di Kecamatan Banda Naira

“Kalau dilihat dari faktor yang menghambat sih menurut saya salah satunya masih minim sekali akomodasi penginapan yang ada di Kecamatan Banda Naira, sumber daya manusia dibidang pariwisata yang masih rendah, belum adanya pusat informasi wisata dan minimnya moda transportasi menuju ke Kecamatan Banda Naira, saya harap perlu adanya perhatian serius dari pemerintah daerah agar dunia pariwisata yang ada di Kecamatan Banda Naira bisa bersaing dengan daerah lain.” (Hasil wawancara YL, 9 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa faktor penghambat pemerintah dalam memasarkan pariwisata di Kecamatan Banda Naira yaitu masih minimnya akomodasi penginapan atau hotel, belum adanya pusat

informasi wisata, sumber daya manusia dibidang pariwisata masih rendah serta minimnya moda transportasi menuju Kecamatan Banda Naira.

Berikut dibawah ini hasil wawancara dengan salah satu pengurus KPCB (Komunitas Pemuda Cinta Banda) terkait kendala atau hambatan yang dihadapi dalam memasarkan pariwisata bahari :

“Masalah kepariwisataan, khususnya wisata bahari di daerah ini sangat kompleks dan tidak mudah menyelesaikannya, karena menyangkut aspek penguasaan wilayah adat, sumberdaya manusia masyarakat setempat yang masih rendah, sarana dan prasarana penunjang yang belum mampu disiapkan masyarakat, kondisi sosial budaya, politik dankeamanan yang terkadang kurang menunjang, aspek persaingan, iri hati, kemalasan dan lainnya" (Hasil wawancara RL, 09 maret 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa bahwa faktor penghambat dalam memasarkan pariwisata bahari sangatlah kompleks seperti sumber daya manusia yang masih rendah, sarana prasarana penunjang yang masih minim serta kondisi social masyarakat dan keamanan yang masih belum efektif.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Pemerintah harus memberikan kemudahan, penyediaan sarana dan prasarana serta dana karena masyarakat secara finansiai juga tidak sanggup. Selain mempersiapkan sumberdaya manusia (pelatihan-pelatihan), dan juga sangat dibutuhkan baik dari pihak pemerintah maupun swasta" (Hasil wawancara RA, 09 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pemerintah dalam memasarkan Pariwisata bahari di Banda Naira harus memperhatikan sarana prasarana penunjang serta pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat agar masyarakat juga dapat mandiri dalam mengelola pariwisata di Kecamatan Banda Naira. Berikut hasil wawancara dengan JK selaku tokoh masyarakat

“Dalam mengembangkan Daerah menjadi daerah yang maju akan pariwisatanya tentunya harus di dukung oleh masyarakatnya juga. Masih banyak masyarakat di Kecamatan Banda Naira yang belum memahami tentang kebersihan lingkungan hidup, belum kreatif dalam melihat peluang bisnis dibidang pariwisata. Yang saya takutkan kita masyarakat di Kecamatan Banda Naira akan menjadi tamu di negeri sendiri melihat sumber daya manusianya yang masih kurang.” (Hasil wawancara JK, 9 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masih minimnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan serta masih rendah sumber daya manusia di bidang pariwisata menjadi salah satu faktor penghambat pariwisata di Kecamatan Banda Naira.

Hal serupa di sampaikan oleh salah satu wisatawan lokal asal Bandung, mengatakan bahwa:

"Saya sangat senang berkunjung ke Banda Naira, ini mungkin sudah keempat kalinya saya datang ke sini, namun lagi-lagi kendala yang saya hadapi ketika mau berkunjung ke sini adalah masalah masih minimnya transportasi menuju ke kepulauan Banda Naira. bukan hanya itu saja, faktor sarana prasarana penunjang juga masih terbilang minim sekali padahal Banda Naira mempunyai banyak potensi wisata yang patut dibanggakan. Serta faktor keamanan pengunjung yang belum maksimal. Mudah-mudah pemerintah setempat bisa meminimalisir segala kekurangan yang ada agar wisata yang ada di Banda Naira bisa berkembang dan bersaing dengan tempat-tempat wisata lain yang ada di Indonesia"( Hasil wawancara AP, 10 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa masih banyaknya kendala-kendala yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat dalam upaya memasarkan pariwisata bahari di Kecamatan Banda Naira seperti akses transportasi menuju ke kepulauan Banda Naira, sarana prasarana penunjang serta keamanan yang perlu ditingkatkan.